

LAPORAN KINERJA INSTANSI PENERINTAH (LKIP) KECAMATAN KUTE SIANTAN TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenannyalah kami dapat menyelesaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 pada unit organisasi Kantor Kecamatan Kute Siantan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan bentuk pertanggung jawaban dari salah satu tugas dan Kewajiban Camat dalam melaksanakan seluruh program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan batasan kewenangan yang telah dilimpahkan (didelegasikan) oleh Bupati kepada Camat dan tugas serta fungsi Kecamatan sebagai lembaga teknis kewilayahan unsur pendukung pelaksana kebijakan pemerintah daerah yang bersifat spesifik dan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, diantaranya mensukseskan implementasi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi program prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kami menyadari bahwa penyampaian dan pemaparan materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna, sehingga saran pendapat yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan.

Terakhir kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKIP ini.

Payamaram, 31 Desember 2024
CAMAT KUTE SIANTAN

MUSTAJAB, S.Pd.SD
Pembina IV.b
196803101993031011

DAFTAR ISI

K A T A P E N G A N T A R.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
A. Kondisi Umum Kecamatan.....	2
a. Kondisi Eksistening Kecamatan Kute Siantan.....	2
b. Kondisi Sosil Politik.....	3
b.1 Pendidikan.....	3
b.2 Kondisi Perekonomian Masyarakat.....	4
A. 2 Struktur Organisasi.....	4
A.3 TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT.....	5
A.4 Sumber Daya Aparatur Kecamatan.....	6
B . PERMASALAHAN UTAMA/ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	8
C . Dasar Hukum.....	9
D . Sitem Penyajian.....	9
BAB II.....	11
PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Rencana Strategis.....	11
2.1. Perencanaan Strategis.....	11
2.2 Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	14
2.3 Perjanjian Kinerja 2024.....	15
BAB III.....	17
AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	17
B. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	18
BAB IV.....	27
PENUTUP.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	3
Tabel 1.2.....	3
Tabel 1.3.....	8
Tabel 1.4.....	8
Tabel 2.1.....	12
Tabel 2.2.....	13
Tabel 2.3.....	14
Tabel 2.4.....	15
Tabel 2.5.....	16
Tabel 3.1.1.....	19
Tabel 3.1.2.....	20
Tabel 3.1.3.....	20
Tabel 3.1.4.....	21
Tabel 3.1.5.....	21
Tabel 3.1.6.....	21
Tabel 3.1.7.....	22
Tabel 3.1.8.....	22
Tabel 3.1.9.....	23
Tabel 3.1.10.....	23
Tabel 3.1.11.....	24
Tabel 3.1.12.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Katapang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

A. Kondisi Umum Kecamatan

a) Kondisi Eksistening Kecamatan Kute Siantan

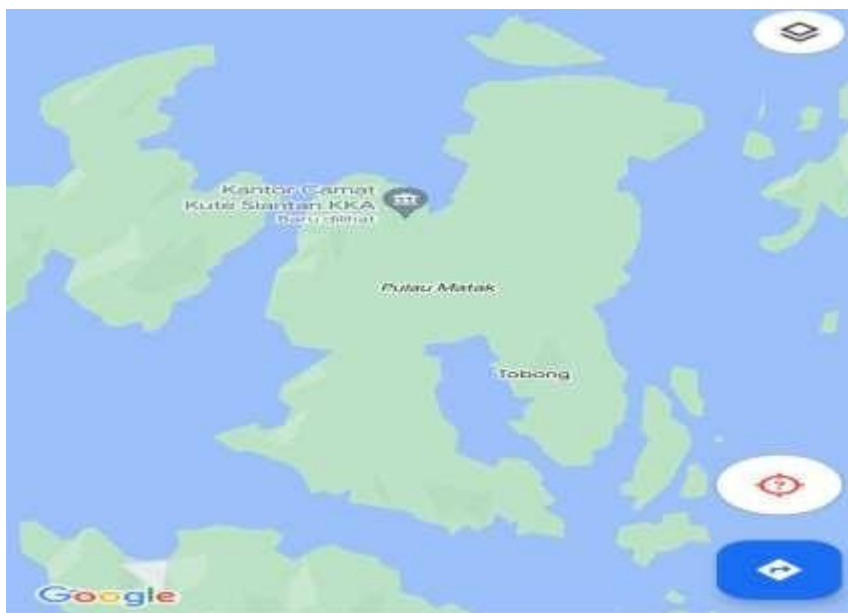
Kecamatan Kute Siantan adalah salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, letak geografis Kecamatan Kute Siantan $3^{\circ}04'34''$ - $3^{\circ}27'30''$ Lintang Utara - $106^{\circ}02'14''$ - $106^{\circ}27'58''$ Bujur Timur.

Adapun batas wilayah Kecamatan Kute Siantan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Cina Selatan
- Sebelah Selatan : Siantan Tengah
- Sebelah Barat : Siantan Utara
- Sebelah Timur : Palmatak

Gambar 1.1

Peta Kecamatan Kute Siantan



Dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan dalam memberikan Pelayanan Publik di Kecamatan Kute Siantan di dukung oleh 5 (Lima) Desa. Jumlah Pemerintah Kecamatan Kute Siantan

Tabel 1.1

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN KUTE SIANATAN

No	Desa	Jumlah Penduduk
1	Batu Ampar	604
2	Payalaman	1.319
3	Payamaram	874
4	Matak	426
5	Teluk Bayur	473
	Jumlah	3696

b. Kondisi Sosil Politik

b.1 Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Kute Siantan, mulai dari TK, Paud, SD sampai SMA, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2

SARANA PENDIDIKAN DI KECAMATAN KUTE SIANATAN

NO	DESA		JUMLAH
1	PAYALAMAN	1. SD 005 PAYALAMAN 2. TK 003 PAYALAMAN 3. MTS NURUL HUDA 4. PAUD ANOA PAYALAMAN	4
2	PAYAMARAM	1. SD/MIS ABABIL JANNAH 2. SMA / MADRASAH ALIAH 3. PAUD AL-KAHFI	3
3	BATU AMPATR	1. SD 003 BATU AMPAR 2. PAUD MUTIARA	2
4	TELUK BAYUR	1. SD 004 TELUK	2

		BAYUR 2. TK TELUK BAYUR	
5	MATAK	1. SD 002 MATAK 2. TK WIJAYA KUSUMA MATAK	2
		TOTAL	13

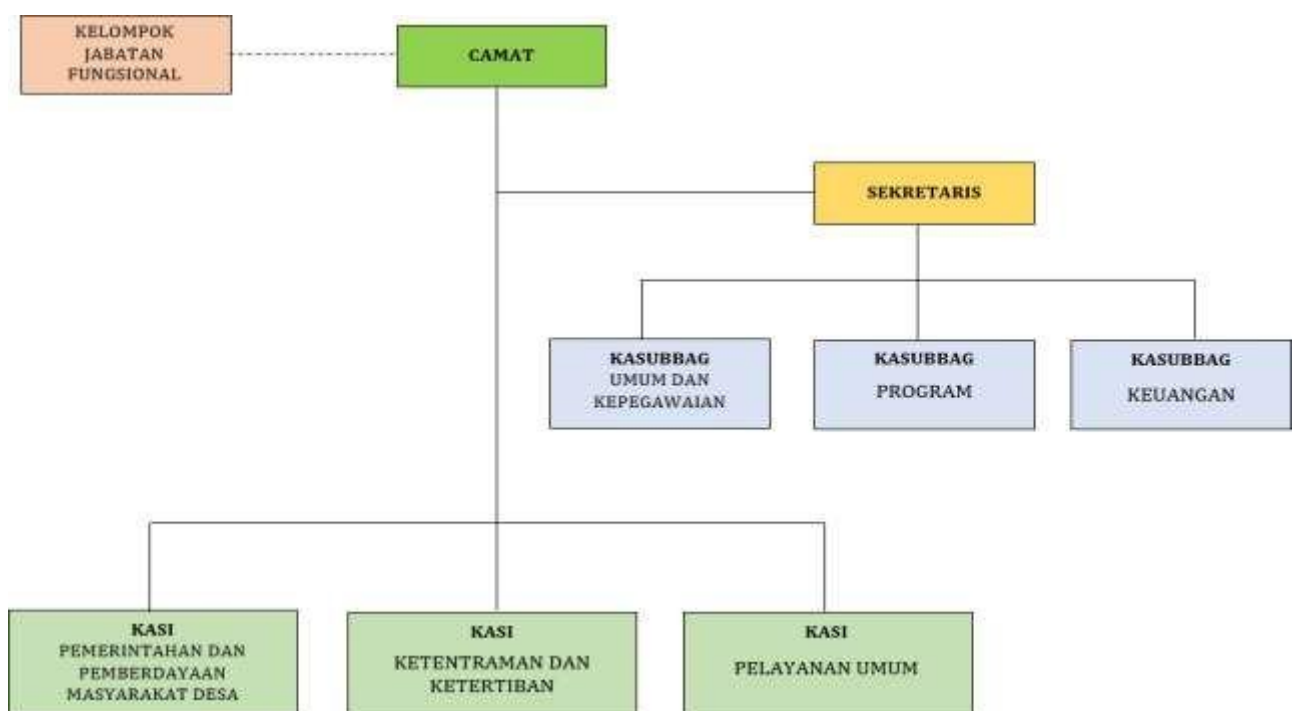
b.2 Kondisi Perekonomian Masyarakat

Kondisi sarana pendukung perekonomian masyarakat di Kecamatan Katapang sampai saat ini masih dalam tahap perkembangan sehingga masih sangat diperlukan pembinaan dan pemberian modal dari pihak terkait, adapun sarana perekonomian masyarakat sebagai berikut :

- Pertanian
- Peternakan
- Perdagangan Konsumsi dan Akomodasi
- Kerajinan Rumah Tangga
- Industri
- Unit Usaha Jas

A. 2 Struktur Organisasi

Gambar 2.2
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



A.3 TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT

Susunan Organisasi Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, susunan Organisasi Kecamatan Kute Siantan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan
- c. SUB BAG Umum dan Kepegawaian
- d. SUB BAG Program dan Keuangan
- e. KASI Pemerintahan
- f. KASI Pemberdayaan Masyarakat

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Kute Siantan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
- b. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan;

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai berikut:

A.4 Sumber Daya Aparatur Kecamatan

NO	NIP/NIPTT	GELAR DEPAN	NAMA	ALAMAT	TEMPAT TGL LAHIR	GELAR BELAKANG	JENIS KELAMIN	PANGKAT / GOL. RUANG	TMT PANGKAT / GOL. RUANG	NAMA JABATAN	ESELO N
							L:1 / P:2				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1	19680310 1993031011	-	MUSTAJAB	TAREMPA	TEBANG, 10-03-1968	S.Pd.SD	L:1	PEMBINA TK.I (IV.b)	17-05-2023	CAMAT	IV.b
2	19780831 200212 2 007	-	YULIANA	PAYAMARAM	PAYALAMAN, 31-08-1978	S.Pi	P:2	PENATA TK. I (III/d)	02-03-2011	SEKRETARIS CAMAT	IV.a
3	19810125 201001 1 010	-	AMRAN	LANGIR	LANGIR, 25-01-1981	S.IP	L:1	PENATA TK. I (III/d)	01-04-2022	KASI PELAYANAN UMUM	IV.a
4	19820107 201001 1 015	-	EDWARD FIRDAUS SEMBIRING	PAYAMARAM	MEDAN, 07-01 -1982	S.SOS	L:1	PENATA TK. I (III/d)	01-04-2022	KASI TRANTIB	IV.a
5	19820706 201001 1 017	-	RODI Hidayat	LADAN	LADAN, 06-07-1982	S.Sos	L:1	PENATA TK. I/ III.d	1/4/2022	KASI TAPEM DAN PMD	IV.a
6	19761220 201001 2 009	-	WWIN NURAENI	PAYAMARAM	SUMEDANG, 20-12-1976	S.A.P	P:2	PENATA MUDA TK.I/ III.b	01-10-2021	KASUBBAG KEUANGAN	IV.b
7	198102172005022003	-	FENI YURLINA	MATAK	T.PINANG, 17-02-1981	S.KEP	P:2	PENATA MUDA TK.I/ III.b	01-10-2021	KASUBBAG UMPEG	IV.b
8	19850522 201101 1 001	-	RONIAHMADI	TELUK BAYUR	TAREMPA, 22-05-1985	S.I.P	L:1	PENATA MUDA/ III.a	18-08-2023	KASUBBAG PROGRAM	IV.b
9	19811010 200604 1 022	-	YUDIRIANTO	TEBANG	MIDAI, 10-10-1981	-	L:1	PENGATUR TK.I/ II.d	01-04-2018	PENGADMINISTRASI UMUM	-
10	19830909 201101 1 003	-	SYAHRIL	PUTIK	PUTIK, 09-09-1983	-	L1	PENGATUR TK.I/ II.d	01-04-2021	PENGADMINISTRASI UMUM	-
11	19870806 201101 1 001	-	WARDANY	MATAK	TEBANG, 06-08-1987	-	L:1	PENGATUR TK.I/ II.d	01-04-2022	PENGADMINISTRASI UMUM	-
12	19830412 201001 2 020	-	HADRIATI	PAYALAMAN	PAYALAMAN, 12-04-1983	S.I.P	P:2	PENATA MUDA/ III.a	18-08-2023	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	-
13	19840920 201001 1 011	-	IS SUGIANTO	PAYAMARAM	TELUK DURIAN, 20-09-1984	-	L.1	PENGATUR TK.I/ II.d	01-10-2023	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	-

NO	NIPTT	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	GELAR BELAKANG	ENIS KELAMI	JURUSAN	NAMA JABATAN
1	198209120980	EFFENDI	PAYALAMAN, 12-09-1982	PAYALAMAN	ST	L:1	TEKNIK MESIN	ANALIS EVALUASI PERENCANAAN DAN PELAPORAN
2	198705132372	RAHMA YUSA	BATU AMPAR	LADAN	S,Sos	L:1	ADMINISTRASI NEGARA	PENATA LAPORAN KEUANGAN
3	199111202034	MUHAMAD LASE	LADAN, 20-11-1991	LADAN	SH	L:1	ILMU HUKUM	ANALIS TATA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	199108165114	FIRDAUS	PUTIK, 16-08-1991	PUTIK	S.Sos	L:1	ADMINISTRASI NEGARA	ANALIS LAYANAN UMUM SEKSI PELAYANAN UMUM
5	199201081903	ZANARIAH	MUSAI, 8-01-1992	TELUK DURIAN	SP	L2	SARJANA PERTANIAN	ANALIS LAYANAN UMUM
6	199207174384	AZRIADI	BATU AMPAR, 17-07-1992	BATU AMPAR	S,Sos	L1	ILMU SOSIOLOGI	ANALIS TATA USAHA
7	199201085247	ANDI KARYAN	LETUNG, 08-01-1992	AIR NANGAK	S,Sos	L1	ADMINISTRASI NEGARA	PENGADMINISTRASI UMUM
8	199203112601	ROBI	LANGIR, 11-03-1992	LANGIR	S, Sos	L:1	ADMINISTRASI NEGARA	PENYULUH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
9	199305143782	ANDI	PUTIK, 14-05-1993	PUTIK	S.KOM	L:1	ILMU SISTEM INFORMASI	PENGLOLA DATA SEKSI PELAYANAN UMUM
10	199306045014	JUNMARIE	PAYALAMAN, 04-06-1993	BATU AMPAR	S.KOM	L1	ILMU SISTEM INFORMASI	PENGLOLA PROGRAM DAN KEGIATAN
11	199405132410	PURNIA NIKI	KUALA MARAS, 13-05-1994	PAYALAMAN	S.SOS	P:2	ADMINISTRASI NEGARA	PENATA LAPORAN KEUANGAN SUBBAG KEUANGAN
12	199405255002	TRISNAWATI	ULU MARAS, 25-05-1994	PUTIK	SE	P:2	MANAJEMEN	PENGADMINISTRASI KEUANGAN SUBBAG KEUANGAN
13	199410243567	MUHAMMAD FARIZKI	PAYALAMAN, 09-03-1995	PAYALAMAN	SH	L:1	ILMU HUKUM	ANALIS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
14	199412102357	YUSNITA WATI	PUTIK, 10-12-1994	PUTIK	S.KOM	P:2	INFORMATIKA	PENGOLAH DATA
15	199410104259	FENNI	AIR NANGAK, 10-10-1994	AIR NANGAK	S.Sos	L1	ILMU ADMINISTRASI NEGARA	PENGADMINISTRASI UMUM
16	199411113529	WAN MARLENA	TEREMPA, 11-11-1994	BATU AMPAR	S.Sos	P:2	SOSIOLOGI	PENGLOLA BAHAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
17	199504054545	RISTIANA.S	BATU AMPAR, 05-04-1995	BATU AMPAR	SST.Pa	P:2	MANAJEMEN PAJAK	PENGADMINISTRASI KEUANGAN
18	199506284383	HARDI PUTRA	TEBANG, 28-06-1995	PAYAMARAM	S.Sos	L:1	ILMU SOSIOLOGI	PENGLOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
19	199608084747	DESI PUTRI	PENGADAH, 08-08-1996	PAYAMARAM	S,AP	P:2	ADMINISTRASI PUBLIK	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM
20	199801136026	RIKO ILYANDI	PUTIK, 13-01-1998	PUTIK	S.M	L:1	MANAJEMEN	ANALISIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
21	199812195199	RIKO SAPUTRA	AIR NANGAK, 19-12-1998	AIR NANGAK	S,JP	L:1	ILMU PEMERINTAHAN	PENGADMINISTRASI UMUM
22	197503043637	AMIYATI	LANGIR, 04-03-1975	LANGIR	-	P:2	-	PENGADMINISTRASI UMUM
23	198103101442	JAMALUDIN	SINGKAWANG, 10-03-1981	PAYALAMAN	-	L:1	-	PENGADMINISTRASI
24	198109070317	TETI HARNITA	PAYALAMAN, 07-09-1981	PAYALAMAN	-	P:2	-	PENGADMINISTRASI UMUM
25	198208051271	HENDRI	TEBANG, 09-06-1982	PAYAMARAM	-	L:1	-	PENGADMINISTRASI UMUM
26	198509032238	SEPRIAWATI	TAMBELAN, 03-09-1985	BATU AMPAR	-	P:2	-	PENGADMINISTRASI UMUM
27	199506104473	RIA KARTIKA	PAYALAMAN, 13-07-1993	PAYAMARAM	-	P:2	-	PENGADMINISTRASI UMUM
28	199512195366	DENSI SISWANDI	AIR NANGAK, 19-12-1995	AIR NANGAK	-	P:1	-	PENGADMINISTRASI UMUM
29	199706083395	JUMIRANTI	PABUNG, 09-06-1997	LANGIR	-	P:2	-	PENGADMINISTRASI UMUM
30	199803184906	SAHRIPUDIN	PAYALAMAN, 18 MARET 1998	TELUK BAYUR	-	L:1	-	PENGADMINISTRASI UMUM
31	199604225807	NURHAYATI	PUTIK, 22-04-1996	PAYALAMAN	-	P:2	-	PENGADMINISTRASII UMUM
32	199810304993	RAHAYU	MATAK, 30-10-1998	MATAK	-	P:2	-	PENGADMINISTRASII UMUM
33	199808205230	KARMILA	PAYALAMAN, 20-08-1998	PAYALAMAN	-	P:2	-	PENGADMINISTRASII UMUM
34	199908054495	WAN MOHAMAD RAKASH	LADAN, 05-08-1999	PAYAMARAM	-	P:2	-	PENGADMINISTRASI UMUM
35	199908095961	DANDI RABANDI	BAYUR, 09-08-1999	TELUK BAYUR	-	L:1	-	PENGADMINISTRASI UMUM
36	200010124048	WAN AZRULLOH	TAREMPA, 12-10-2000	LADAN	-	L:1	-	PENGADMINISTRASI UMUM
37	199107095248	KAMARUDIN	LANGIR, 09-07-1991	LANGIR	-	L:1	-	PRAMU KEBERSIHAN
38	196503075746	MUHAMMAD ZEN	PAYALAMAN, 07-03-1965	PAYALAMAN	-	L:1	-	PRAMU KEBERSIHAN

Table 1.3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	JML
1	Kecamatan Kute Siantan	-	-	1	7	43	51
	Jumlah	-	-	1	7	43	51

Table 4

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	DIV	D3	SMA	SMP	SD	JML
1	Kecamatan Kute Siantan	-	-	29	1	-	20	-	1	51
	Jumlah	-	-	29	1	-	20	-	1	51

B. PERMASALAHAN UTAMA/ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal Kecamatan Kute Siantan adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam Perencanaan masih kurang maksimal;
2. Kurang maksimalnya data yang tersedia di layanan informasi;
3. Kurang terpeliharanya sarana/fasilitas umum Kecamatan;
4. Belum adanya bimtek atau pelatihan sesuai dengan jabatan;
5. Belum optimalnya kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat yang kondusif.

Permasalahan utama yang ada di Kecamatan Kute Siantan seperti diatas merupakan permasalahan masalah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Kute Siantan Masih Kurangan baik dari kemampuan karyawan itu sendiri sehingga masih terdapatnya kekurangan dalam hal pemberian pelayanan.

C . Dasar Hukum

LKIP Kecamatan Kute Siantan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor.PER/.09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor.12 tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

D . Sitem Penyajian

Bab. I- Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya aparatur, dasar hukum penyusun LKIP dan sistem penyajian LKIP.

Bab II- Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2021 – 2026 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2024

Bab III- Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Kute Siantan Kabupaten kepulauan Anambas adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Strategis Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Rencana Strategis Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Kute Siantan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Penyusunan Renstra Kecamatan Kute Siantan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Kute Siantan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Kute Siantan dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kute Siantan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Kute Siantan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Tabel 2.1
Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
			Indeks Kepuasan layanan Masyarakat
2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri
			Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan

Tabel 2.2
Tabel Tujuan Sasaran dan Indikator

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Sasaran Kinerja Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntable	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (51,76)	B (60,10)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)
			Indeks Kepuasan layanan Masyarakat	B (81,29)	B (82,00)	A (84,00)	A (86,00)	A (88,00)	A (89,00)
2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	20%	40%	60%	80%	100%	100%
			Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Salah satu Visi Misi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing Maju dan Berahlakul Karimah (Anambas Bermadah II) dan Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi

Tabel 2.3

INDIKATOR Kinerja Utama Kecamatan Kute Siantan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	1 Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Kute Siantan yang baik, bersih dan akuntabel	1 Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
			2 Mengoptimalkan System Pelayanan Publik	2 Peningkatan Kualitas pelayanan Publik Kecamatan Kute Siantan
2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong	1 Mengoptimalkan Tata Kelola Desa menuju Desa Mandiri	1 Peningkatan Tata Kelola Desa Menuju Desa Mandiri
			2 Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelembagaan Tingkat Kecamatan	2 Peningkatan peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong

2.3 Perjanjian Kinerja 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntable	Indeks Reformasi Birokrasi	60	60
		Indeks Kepuasan layanan Masyarakat	82	82
2	Terwujudnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	40	40
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	100	100

Tabel 2.5
APBD Perubahan Tahun 2024

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3,762,430,107.00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	59,261,200.00	
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	75,758,164.00	
Jumlah		3,890,314,363	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Kute Siantan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Kute Siantan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kegiatan dan sub kegiatan yang ada dan di laksanakan di tahun 2022, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi dan penunjang keberhasilan nilai Sakip Kabupaten Kepulauan Anambas.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator

kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kegiatan dan sub kegiatan, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2022 hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD dan indikator kinerja (out comes).

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian indikator kinerja utama yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dan didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2022 serta hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Camat.

Sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Kute Siantan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Katapang Kute Siantan juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama yang jadi acuan di tahun sebelumnya, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja suatu indikator yang dilaksanakan di tahun sebelumnya, permasalahan serta isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi guna penunjang keberhasilan suatu target kinerja yang sudah di sepakati dan di tandatangani oleh pejabat di suatu pemerintahan. Hasil pengukuran atas keberhasilan dalam indikator kinerja utama yang sudah di laksanakan Kecamatan Kute Siantan tahun 2022 dan sudah di ukur sesuai dengan peraturan yang berlaku menunjukan hasil sebagai berikut:

PENGUKURAN KINERJA SASARAN TERDIRI DARI INDIKATOR :

Tabel 3.1.1
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
Kecamatan Kute Siantan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capain
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Reformasi Birokrasi	%	60	60	71
2	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat	%	82	82	89
3	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	%	40	40	100
4	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100	100	100

Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dikarenakan Kecamatan Kute Siantan tiap tahunnya mencapai realisasi yang baik.

Tabel 3.1.2

Perbandingan Antara Realisasi Serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun yang lalu Kecamatan Kute Siantamn 2023

NO	Indikator Kerja Utama		2022		2023	
		Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	6		8	9
1	Indeks Reformasi Birokrasi	%	51,76	51,76	60	60
2	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat	%	81		82	82
3	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	%	20	20	40	40
4	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100

Capaian kinerja nyata indikator Persentase yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya yang di rencakana tidak begitu besar di karekan dokumen-dokumen yang tersedia masih dalam proses penyempurnaan guna pencapaian kinerja lebih baik.

Tabel 3.1.3

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Indikator Kinerja Kecamatan

Sekretaris Kecamatan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang berkualitas	100%
Kasubag Program Keuangan			
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Presentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah laporan/dokumen capaian kinerja, keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kecamatan Kute Siantan	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

Tabel 3.1.4

**Analisis Program Kegiatan Yang Menuju Keberhasilan Tercapainya Indikator
Kinerja Kecamatan**

No	Program	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.735.000	APBD

1 . Indikator 2, Persentase RPJMD dalam Kondisi Baik.

Tabel 3.15

**Membandingkan antara dan Realisasi Kinerja Kecamatan Kute Siantan Tahun
2023**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Persentase RPJMD Dalam Kondisi Baik	%	60,10	60,10	60,10

Capaian Kinerja Utama Indikator Persentase RPJMD Dalam Kondisi baik di rencanakan dalam Perjanjian Kerja Tahun 2023.

Tabel 3.1.6

**Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini
dengan Tahun yang lalu Kecamatan Kute Siantan Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Utam	Satuan	2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Reformasi Birokrasi	%	51,76	51,76	60,10	60,10
2	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat	%	81,29	81,29	82,00	82,00
3	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	%	20	20	40	40
4	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100

Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu realisasi mencapai target.

Tabel 3.1.7

Membandingkan realisasi Dengan tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat Dalam Dokumen Perencanaan

No	Sasaramn Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Tahun 2023	
					Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Persentase RPJMD	%	63,00	63,00	63,00

Capaian kinerja nyata indicator Target Jangka Menengah Persentase RPJMD dalam kondisi baik.

Tabel 3.1.8

Penyebab Keberhasilan Tercapainya Indikator Kinerja Persentase RPJMD dalam Kondi Baik

Sekretaris			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Persentase tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%
Kasubag Umum dan Kepegawaian			
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tertib Administrasi Aset	Persentase Pengelolaan Aset Bergerak dan Aset tidak bergerak	

Dari tabel diatas dapat diketahui sasaran dan indikator kinerja yang mendukung pada pencapaian sasaran organisasi untuk Persentase RPJMD dalam kondisi baik di Kecamatan Kute Siantan tahun 2024.

Adapun Program ,kegiatan dan Anggaran yang menunjang keberhasilan dan pencapaian indikator Persentase RPJMD/Aset dalam kondisi baik tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.9

**Penyebab Keberhasilan /Kegagalan Tercapainya Indikator Kinerja
Persentase RPJMD kondisi baik**

Sekretaris			
No	Program	Anggaran	Target
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.755.294.999	APBD
Kasubag Umum dan Kepegawaian			
NO	Sasaran Strategis	Anggaran	Target
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.735.000	APBD
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.722.900	APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.056.200	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.019.158	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	181.454.195	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.051.474.966	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.560.015	APBD
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.235.272.565	APBD

Dari tabel diatas dapat diketahui sasaran dan indikator kinerja yang mendukung pada pencapaian sasaran organisasi untuk Persentase dalam kondisi baik di Kecamatan Kute Siantan.

Tabel 3.1.10

Penyebab Keberhasilan Tercapainya Indikator Kinerja

Sekretaris			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	100%

		Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%
Kasubag Umum dan Kepegawaian			
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%

Penyebab keberhasilan indikator dalam sekretariat karena meningkatnya kesadaran di lingkungan kecamatan Kute Siantan tentang kedisiplinan, administrasi serta mampu bersaing di era go digital untuk peningkatan kinerja.

Tabel 3.1.11
Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Tercapainya Indikator Kinerja Kecamatan

Sekretaris			
No	Program	Anggaran	KET
1	2	3	4
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ kota	3.755.294.999	APBD
Kepala Seksi Pemerintahan			
No	Program	Anggaran	KET

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Kute Siantan, adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan KUTE Siantan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.12

S

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.755.294.999,00	3,128,002,159.00
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.735.000,00	17,160,000.00
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.116.500,00	5,460,000.00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.235.272.565,00	1,983,964,953.00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.112.722.565,00	1,922,234,953.00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	107.400.000,00	52,990,000.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.990.000,00	2,870,000.00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	9.160.000,00	5,870,000.00
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.721.684,00	105,967,500.00
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.837.556,00	30,911,500.00
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.640.283,00	4,620,000.00
3	Penyediaan bahan Logistik Kantor	8.823.360,00	1,872,000.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.984.595,00	6,967,000.00
5	Fasilitasi kunjungan tamu	10.955.890,00	-
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.480.000,00	61,597,000.00
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125,686,875.00	125,686,875.00
1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.686.875,00	125,686,875.00
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.051.474.966,00	882,204,631.00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.650.000,00	15,620,000.00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.030.824.966,00	866,584,631.00
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.560.015,00	680,000.00

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.080.015,00	0,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.480.000,00	680,000.00
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	59.261.200,00	52,260,000.00
XIV	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	59.261.200,00	52,260,000.00

1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan bangsa	53.460.000,00	52,260,000.00
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.801.200,00	0.00
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	75.758.164,00	50,192,500.00
XV	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75.758.164,00	50,192,500.00
1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8.283.200,00	7,375,500.00
2	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	67.474.964,00	42,817,000.00

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perangkat daerah Kecamatan Kute Siantan Tahun 2024, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Keberhasilan atau kegagalan Kecamatan Kute Siantan dapat dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang dapat direalisasikan, dimana secara umum Kecamatan Kute Siantan telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kute Siantan dan Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, tingkat kegagalannya tidak prinsipil atau bersifat fatal.

Adapun permasalahan- permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kute Siantan secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.
2. Masih kurangnya pelatihan terkait dengan jabatan
3. Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan, yaitu :
 - a. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai.
 - b. Penyediaan sarana dan parasarana penunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan pemerintahan.
 - c. Rapat Koordinasi dilaksanakan setiap bulan.
 - d. Pembangunan beberapa fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum.

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

1. Pengadaan pelatihan jabatan;
2. Penambahan saran dan prasarana penunjang pelayanan publik;
3. Pelaksanaan pelatihan/bimtek terkait dengan tugas dan fungsi;
4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip- prinsip Administrasi Negara/ fungsi- fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.